

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU / DOKUMEN

- Djumhana Muhammad. 1993. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana Muhammad. 1996. Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garner Bryan. 2014. Black's Law Dictionary, 10th Edition. Amerika : Thomson West.
- Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta : Prenada Media.
- Hermansyah. 2013. Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi - Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim Johannes. 2004. Bank sebagai lembaga intermediasi dalam hukum positif. Bandung: CV.Utomo.
- Idroes Ferry N. 2006. Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mamudji Sri. 2005. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso Lukman. 2011. Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Siamat Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter dan Perbankan, Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soetiono Kusumaningtuti S., Arah Kebijakan OJK mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, disampaikan pada Seminar Nasional Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, 7 November 2013 di Jakarta.
- Sutedi Adrian. 2006. Hukum Perbankan. Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Supriadi Budi F., SH. , M Hum, Diktat Perkuliahan Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Tahun Ajaran 2006-2007.

Suhardi Gunarto. 2003. Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kanisius.

Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, cet.3. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Usman Rachmadi. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Waluyo Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek, ed. 1, cet. 3. Jakarta : Sinar Grafika.

Widiyono Try. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa & Kredit). Bogor: Ghalia Indonesia.

Widjanarto. 2003. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Undang No. 6 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah melalui Undang - Undang No. 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui PMK No. 73/PMK.03/2017 tanggal 12 Juni 2017

Peraturan BI No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/337/UPPB/PbB perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank, tanggal 11 September 1969

Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di sektor Jasa Keuangan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 64/PUU-X/2012 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Ahmad Fadlil Sumadi,